

BAB I

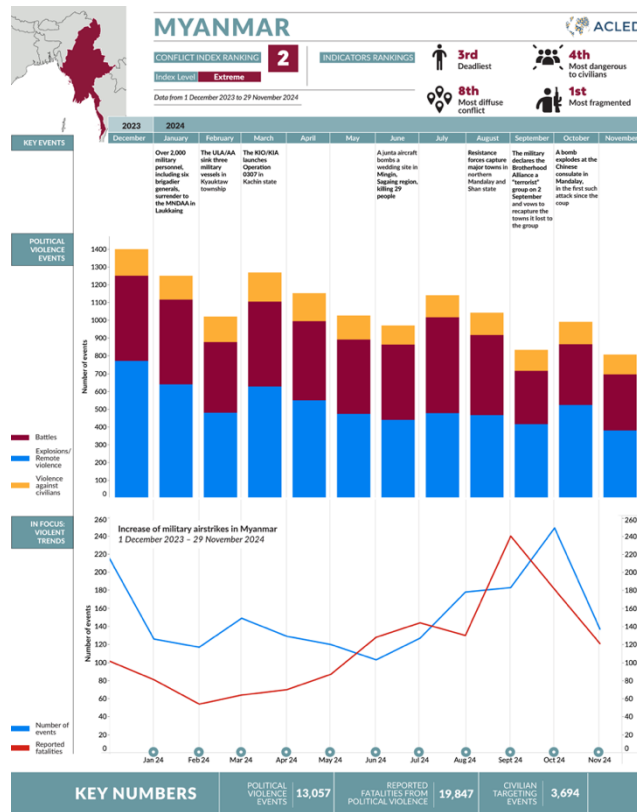
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Kudeta militer yang dilancarkan oleh Tatmadaw (angkatan Bersenjata Myanmar/junta militer) pada tanggal 1 Februari 2021 di Myanmar merupakan titik balik penting yang mengakhiri harapan transisi demokrasi dan sebaliknya, memicu krisis multidimensi yang mendalam dan berkepanjangan. Fenomena ini, yang melibatkan penangkapan pemimpin sipil dan pembatalan hasil pemilu, dengan cepat mengubah masalah politik domestik menjadi isu yang menguji fondasi norma-norma demokrasi, kedaulatan, dan hak asasi manusia (HAM) di tingkat regional maupun global (Schlein, 2021). Peristiwa yang terjadi di Myanmar menunjukkan peningkatan drastis dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan ruang sipil. Represi kejam yang dilakukan otoritas militer terhadap demonstran damai telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan penahanan sewenang-wenang yang meluas di berbagai kota. Selain kekerasan fisik, pihak junta juga menerapkan kontrol ketat terhadap arus informasi melalui kebijakan internet *shutdown* yang bertujuan untuk mengisolasi masyarakat dari dunia luar. Eskalasi kekerasan ini memicu kecaman keras dari berbagai aktor internasional yang kemudian mendorong lahirnya gerakan advokasi transnasional untuk menuntut pertanggungjawaban serta pemulihan tatanan demokrasi di Myanmar.

Sejak pengambilalihan kekuasaan, rezim militer telah memberlakukan rezim represif yang ekstrem. Rezim ini menggunakan kekerasan mematikan dan penahanan

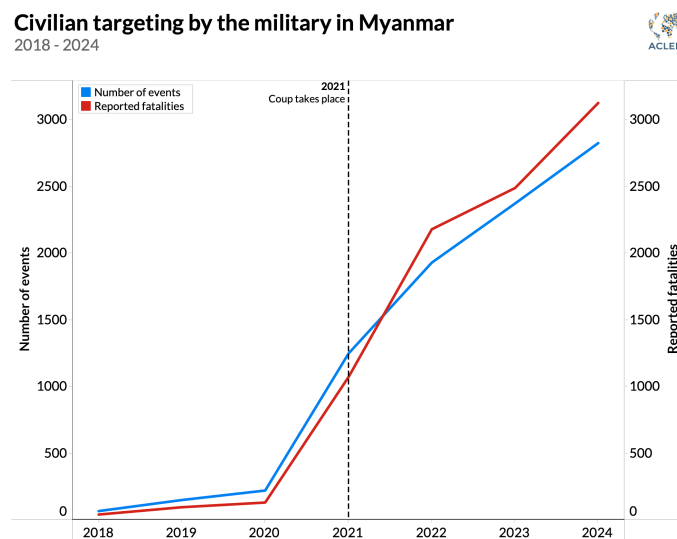
massal sebagai instrumen utama untuk menindak segala bentuk perlawanan sipil. Berdasarkan data dari Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), jumlah korban tewas warga sipil oleh militer dalam empat tahun terakhir telah mencapai angka yang mengejutkan, yaitu setidaknya 6.231 orang, termasuk 1.144 perempuan dan 709 anak-anak (OHCHR, 2025).



Gambar 1.1 Myanmar: 2024 Conflict Index
 Sumber: ACLED (2025)

Krisis ini menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 2024, di mana setidaknya 1.824 orang, jauh melampaui angka tertinggi tahun sebelumnya (1.639 korban pada 2023). Jumlah korban tahun 2024 tersebut, mencakup 531 korban perempuan dan 248 anak-anak (OHCHR, 2025). Tingginya skala

kekejaman dan impunitas ini menegaskan adanya pelanggaran HAM berat yang mengkhawatirkan komunitas internasional. Berdasarkan grafik milik ACLED, analisis tren kekerasan terhadap warga sipil oleh militer di Myanmar menunjukkan adanya eskalasi signifikan pascakudeta 2021. Data memperlihatkan bahwa sebelum kudeta, baik jumlah peristiwa maupun korban jiwa berada di bawah 500, namun melonjak drastis hingga melampaui 2.000 kasus dan korban pada tahun 2022 (ACLED, 2025).



Grafik 1.1 Grafik Jumlah Korban
Sumber: ACLED (2025)

Kondisi represi yang mencekik ini menimbulkan masalah fundamental yaitu terputusnya saluran advokasi dan penyelesaian konflik secara domestik. Masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, jurnalis, pekerja, dan aktivis, secara efektif diblokir aksesnya ke institusi politik, peradilan dan media formal di dalam negeri, yang membuat mereka tidak dapat menyalurkan aspirasi politik atau menuntut akuntabilitas dari rezim yang berkuasa (Human Rights Myanmar, 2024). Sebagai contoh, sejak kudeta, ruang sipil Myanmar dinilai oleh CIVICUS *Monitor* sebagai “tertutup”, dengan

ribuan aktivis dan jurnalis ditahan atas tuduhan sengketa dan penggunaan media sosial, serta sejumlah kasus penyiksaan terhadap tahanan politik (CIVICUS, 2024). Konsekuensi dari penindasan yang sistematis dan menyeluruh ini mendorong kelompok-kelompok perlawanan untuk mencari jalur alternatif, menggeser arena perjuangan mereka dari panggung domestik menuju kancah internasional yang lebih terbuka. Kondisi ini, secara teoritis, adalah prasyarat bagi terciptanya *Transnational Advocacy Networks* (TANs).

Gerakan perlawanan yang muncul dari krisis ini didominasi oleh kelompok pemuda pro-demokrasi, termasuk para aktivis yang berada di *shadow network* di dalam negeri dan aktivis diaspora, yang memilih pendekatan transnasional. Strategi mereka didasarkan pada *Boomerang Pattern*, sebuah mekanisme di mana aktivis domestik yang terhalang komunikasinya oleh pemerintah yang represif akan menjangkau sekutu internasional (NGO, media, IGOs) untuk memberikan tekanan balik pada pemerintah target dari luar (Furtak, 2022). Pemuda pro-demokrasi Myanmar secara aktif berupaya membangun aliansi dengan NGO internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, memanfaatkan media sosial untuk *information politics*, dan melobi badan PBB untuk menerapkan *leverage politics* (Furtak, 2022). Generasi Z Myanmar memainkan peran sentral dalam kampanye digital melawan junta militer dengan menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Tiktok* untuk mengorganisir protes dan menarik perhatian dunia internasional melalui tagar *#WhatsHappeningInMyanmar* (Jordt, Than, & Lin, 2021). Selain melalui tagar, mereka juga melakukan siaran langsung, *digital storytelling* dan visual kreatif, serta kampanye dan masih banyak lagi (King, 2022). Aktivitas-aktivitas ini secara kolektif berupaya

mengeksploitasi norma-norma HAM universal untuk menggalang *shaming international* terhadap junta, sekaligus memperkuat legitimasi *National Unity Government* (NUG).

Selain aktivisme digital di dalam negeri, jaringan diaspora Myanmar memainkan peran strategis sebagai simpul utama dalam memperluas advokasi lintas negara. Diaspora Myanmar tersebar secara signifikan di Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa (Fishbein, 2023). Keberadaan diaspora ini menjadi basis penting mobilisasi solidaritas transnasional yang memperluas jangkauan perjuangan demokrasi Myanmar ke ruang publik internasional. Laporan *Myanmar's Spring Revolution* dari ACLED mencatat bahwa seiring meningkatnya seruan aksi internasional, komunitas diaspora Myanmar telah mengorganisir dan berpartisipasi dalam demonstrasi di berbagai negara sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan perlawanan di dalam negeri (Bynum, 2021). Dalam praktiknya, diaspora mengadopsi pola aksi *hybrid*, yakni kombinasi antara aktivisme digital dan mobilisasi fisik lintas negara. Di ranah digital, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi pelanggaran HAM, membangun narasi solidaritas global, serta melakukan penggalangan dana daring guna mendukung *Civil Disobedience Movement* (CDM) dan jaringan perlawanan, misalnya melalui pasar *online* virtual yang hasilnya disalurkan untuk mendukung kegiatan anti-junta dan organisasi oposisi di Myanmar (Voice of America, 2021). Sementara itu, secara *offline*, diaspora menyelenggarakan aksi demonstrasi di ruang publik strategis, termasuk di depan kantor PBB, parlemen nasional, dan kedutaan Myanmar, serta melakukan lobi kepada aktor politik dan organisasi hak asasi manusia di negara tuan

rumah untuk mendorong tekanan diplomatik terhadap junta militer (Bynum, 2021). Pola mobilisasi lintas ruang ini menunjukkan bahwa diaspora tidak hanya berperan sebagai pendukung pasif, melainkan sebagai aktor politik non-negara yang memperkuat mekanisme *boomerang pattern* dalam kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs), dengan mengamplifikasi suara aktor domestik yang dibungkam oleh rezim represif.



Gambar 1.2 Diaspora Myanmar di Thailand melakukan demonstrasi di kedutaan Myanmar
Sumber: Al Jazeera (2023).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik gerakan pro-demokrasi Myanmar dan strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs). Penelitian pertama adalah karya Vrieza berjudul “Movement Escalation and Mobilization for Resistance: From Anti-Coup Protest to ‘People’s War’ in Myanmar” (Vrieze, 2024). Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana gerakan anti-kudeta di Myanmar berkembang dari aksi demonstrasi damai menjadi bentuk perlawanan bersenjata yang lebih luas akibat represi negara yang semakin brutal. Vrieza menyoroti bahwa eskalasi gerakan dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor, seperti kelompok

pemogokan, organisasi masyarakat sipil, diaspora, anggota parlemen *National League for Democracy* (NLD) yang digulingkan, hingga *Ethnic Resistance Organizations* (EROs). Koalisi tersebut kemudian membentuk *National Unity Government* (NUG) sebagai simbol perlawanan terhadap junta militer. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa represi domestik menjadi faktor pendorong terbentuknya jaringan advokasi lintas negara. Selain itu, pemingkiaan narasi solidaritas antaretnis serta mobilisasi dukungan diaspora dalam penelitian Vrieza memperlihatkan praktik *boomerang pattern* dan *framing strategies* dalam TANs.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Azizah dan Muhammad Ammar Hidayatulloh berjudul “Transnational Advocacy in Increasing Women’s Representation in Myanmar’s Parliament”. Penelitian tersebut menganalisis peningkatan representasi perempuan di parlemen Myanmar melalui proses advokasi transnasional yang melibatkan organisasi perempuan lokal dan NGO internasional. Dengan menggunakan konsep *boomerang pattern*, penelitian ini menunjukkan bagaimana kelompok domestik yang mengalami *non-functioning channel* membangun jaringan dengan aktor internasional untuk memperluas tekanan terhadap pemerintah Myanmar. Jaringan tersebut melibatkan organisasi seperti *Women’s League of Burma* (WLB), *Gender Equality Network* (GEN), serta dukungan NGO asing dan organisasi internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting karena menjelaskan pola hubungan antara aktor domestik, NGO internasional, dan organisasi global dalam membangun tekanan politik terhadap rezim Myanmar. Meskipun fokus utamanya adalah representasi perempuan, penelitian ini tetap relevan karena memberikan dasar

analisis mengenai mekanisme advokasi transnasional yang juga digunakan oleh gerakan pemuda pro-demokrasi pascakudeta 2021 (Azizah & Hidayatulloh, 2019).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Syarifatul Ula mengenai peran *Human Rights Watch* dalam krisis kemanusiaan di Myanmar menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Networks*. Penelitian ini menemukan bahwa *Human Rights Watch* secara dominan menggunakan *information politics* melalui penyebaran laporan pelanggaran HAM dan *symbolic politics* melalui pembentukan narasi kemanusiaan untuk menarik perhatian internasional. Namun, penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan *leverage politics* dan *accountability politics* karena belum adanya tekanan internasional yang cukup kuat untuk memaksa pemerintah Myanmar memenuhi komitmen HAM. Temuan tersebut menjadi relevan bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa strategi advokasi transnasional memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan rezim militer yang represif (Ula, 2017).

Urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini berurusan dengan krisis kontemporer yang terus berlangsung (2021-2024), di mana hasil dari perlawanan sipil ini akan sangat menentukan masa depan demokrasi di Myanmar dan stabilitas regional Asia Tenggara. Kedua, studi ini memiliki relevansi teoritis karena Myanmar menyediakan kasus ideal untuk menguji validitas dan efektivitas kerangka TANs dan *Boomerang Pattern* dalam konteks rezim militer kontemporer yang ahli dalam memutus koneksi informasi. Adopsi strategi advokasi lintas negara oleh pemuda Myanmar dapat dianalisis melalui kerangka TANs, jaringan aktivis yang berupaya memengaruhi aktor internasional, menggunakan *boomerang pattern* saat pengaruh domestik terbatas. Sebuah bab dari *Policy Press* berjudul

“Transnational Advocacy Strategies and Pathways to Change” menyebut bahwa gerakan demokrasi Myanmar berkembang menjadi jaringan advokasi transnasional melalui mobilisasi aktor pengasingan dan diaspora dan melalui *framing* isu kepada aktor luar negeri (Matelski, 2023). Namun, meskipun kajian generik tentang TANs di Myanmar tersedia, penelitian spesifik yang meneliti strategi jaringan pemuda (youth) dalam membentuk aliansi internasional melawan represi junta militer periode 2021-2024 masih relatif terbatas, menunjukkan adanya kekosongan riset yang layak diisi.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) diimplementasikan oleh gerakan pemuda pro-demokrasi Myanmar dalam melawan represi Junta Militer pada tahun 2021-2024?”**.

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis bagaimana gerakan pemuda pro-demokrasi Myanmar mengimplementasikan strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam merespons represi junta militer pada periode 2021-2024, dengan penekanan pada mekanisme advokasi lintas negara yang berbasis mobilisasi informasi, pemingkai narasi, dan aktivasi jaringan transnasional.

1.4.KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. *Transnational Advocacy Networks* (TANs)

Transnational Advocacy Networks (TANs) adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana jaringan aktor lintas negara bekerja sama dalam memperjuangkan isu-isu normatif global, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam karya *Activists Beyond Borders*, yang mendefinisikan TANs sebagai jaringan hubungan formal maupun informal antara berbagai aktor internasional yang terhubung oleh kesamaan nilai, ide, dan tujuan advokasi. Jaringan ini melampaui batas negara dan tidak hanya melibatkan organisasi nonpemerintah (NGO), tetapi juga mencakup individu, akademisi, media, organisasi internasional, serta aktor negara yang memiliki kepedulian terhadap isu tertentu. Dalam konteks negara yang mengalami represi dan tertutupnya saluran partisipasi politik domestik, TANs berfungsi sebagai medium

alternatif untuk menyalurkan aspirasi politik dan membangun tekanan internasional terhadap rezim yang berkuasa (Keck & Sikkink, 2014).

Aktor dalam TANS

Aktor-aktor dalam TANS terdiri atas berbagai elemen yang saling terhubung dan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Aktor domestik, seperti aktivis pemuda, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil, berperan sebagai sumber utama informasi dan isu advokasi. Aktor diaspora berfungsi sebagai penghubung lintas negara yang menjembatani komunikasi antara aktor domestik dan komunitas internasional. Sementara itu, NGO internasional, media global, organisasi internasional, serta pemerintah asing yang bersimpati bertindak sebagai penguat isu dan sumber tekanan politik terhadap pemerintah target. Interaksi antarpelaku ini membentuk jaringan advokasi yang memungkinkan isu domestik memperoleh visibilitas dan legitimasi di tingkat global (Keck & Sikkink, 2014). Tujuan utama dari TANS adalah untuk memengaruhi perubahan perilaku aktor negara atau institusi target melalui tekanan normatif, politik, dan sosial. Jaringan advokasi berupaya mengangkat isu yang terabaikan dalam sistem politik domestik ke arena internasional agar memperoleh perhatian, legitimasi moral, serta dukungan dari aktor-aktor yang memiliki kapasitas tekanan lebih besar (Keck & Sikkink, 2014).

Indikator Strategi TANS

Dalam menjalankan kerja advokasi, Keck dan Sikkink mengidentifikasi beberapa indikator strategi utama dalam TANS. Penelitian ini memfokuskan analisis

pada dua indikator yang paling relevan dengan praktik mobilisasi pemuda Myanmar, yaitu *information politics* dan *symbolic politics*, sementara indikator lain seperti *leverage politics* dan *accountability politics* diposisikan sebagai dimensi pendukung.

a. Information Politics

Information politics merujuk pada kemampuan jaringan advokasi untuk membuat, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyebarkan informasi faktual secara cepat dan kredibel guna memengaruhi persepsi publik internasional dan pengambil kebijakan. Fokus utama strategi ini terletak pada kekuatan bukti empiris, seperti dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, data korban kekerasan, laporan investigasi NGO, rekaman visual kekerasan aparat, serta kronologi peristiwa yang dapat diverifikasi (Keck & Sikkink, 2014).

b. Symbolic Politics

Symbolic politics berfokus pada penggunaan simbol, narasi moral, visualisasi emosional, serta pembingkai identitas korban dan pelaku untuk membangun empati, solidaritas, dan pengaruh normatif di tingkat global. Strategi ini tidak menitikberatkan pada kekuatan data empiris semata, melainkan pada efektivitas narasi dan simbol dalam membentuk makna sosial dan persepsi publik internasional (Keck & Sikkink, 2014). Dengan demikian, *symbolic politics* melengkapi *information politics* dengan memperkuat dimensi emosional dan moral dari advokasi.

c. Leverage Politics

Leverage politics merujuk pada kemampuan jaringan advokasi transnasional untuk memanfaatkan pengaruh aktor-aktor yang memiliki kekuatan lebih besar guna

memberikan tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran advokasi. Kekuatan tersebut dapat bersifat material, politik, ekonomi, maupun simbolik, seperti dukungan negara, organisasi internasional, lembaga donor, atau figur publik yang memiliki otoritas moral. *Leverage politics* tidak selalu berbentuk tekanan langsung, tetapi juga dapat berupa penggunaan reputasi, legitimasi, atau tekanan opini publik untuk memengaruhi perilaku aktor target. Dengan demikian, *leverage politics* menekankan pentingnya aliansi, strategi, dan pemanfaatan sumber daya kekuasaan eksternal dalam memperkuat posisi jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 2014).

d. Accountability Politics

Accountability politics merujuk pada upaya jaringan advokasi untuk menagih komitmen, janji, norma, atau kewajiban yang telah dinyatakan oleh aktor negara atau institusi internasional agar diwujudkan dalam praktik nyata. Strategi ini berfokus pada konsistensi antara pernyataan resmi dan tindakan aktual, serta menekankan pentingnya tanggung jawab moral, hukum, dan politik dari pihak yang telah menyatakan dukungan terhadap nilai atau kebijakan tertentu. *Accountability politics* dapat dilakukan melalui pemantauan kebijakan, pelaporan pelanggaran komitmen, advokasi publik, maupun tekanan reputasi, dengan tujuan memastikan bahwa komitmen normatif tidak berhenti pada tingkat simbolik semata (Keck & Sikkink, 2014).

1.4.1.1. Boomerang Pattern

Konsep *Boomerang Pattern* adalah mekanisme utama yang diidentifikasi dalam fungsi *Transnational Advocacy Networks* (TANs). Mekanisme ini terjadi ketika kelompok masyarakat di tingkat domestik suatu

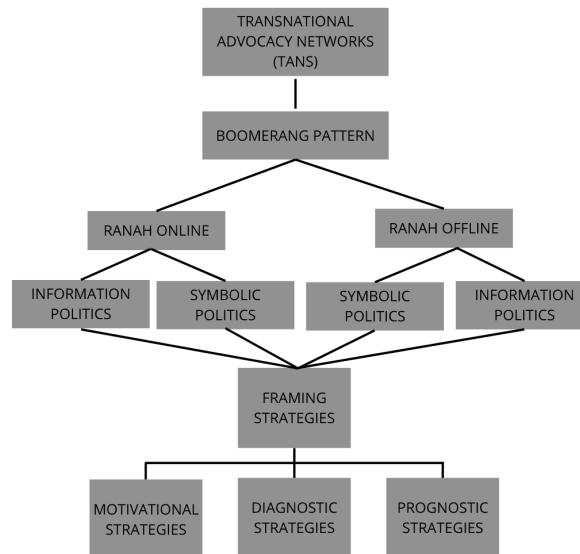
negara tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara langsung kepada pemerintah mereka sendiri, biasanya karena pemerintah menolak, merepresi, atau mengabaikan tuntutan tersebut. Dalam situasi seperti ini, kelompok lokal akan menerapkan strategi dengan menjalin koneksi dan bekerja sama dengan jaringan aktor internasional, seperti organisasi-organisasi internasional, media global, atau *Non-Governmental Organization* (NGO). Melalui saluran transnasional ini, isu yang awalnya terhalang di tingkat domestik akan diangkat dan disebarluaskan di kancah global. Penyebaran isu ini bertujuan untuk menghasilkan tekanan dari luar negeri yang diarahkan kembali kepada pemerintah domestik. Tekanan internasional ini dapat muncul dalam bentuk kecaman diplomatik, perhatian intens dari media global, atau sanksi moral, yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah domestik untuk memberikan respons atau mengubah kebijakan mereka (Keck & Sikkink, 2014).

1.4.1.2. *Framing Strategies*

Framing Strategies adalah suatu pendekatan penting yang digunakan oleh *Transnational Advocacy Networks* (TANs) untuk membentuk cara pandang publik atau masyarakat internasional terhadap sebuah isu, agar isu tersebut selaras dengan nilai-nilai universal yang mudah diterima secara global. Menurut Keck dan Sikkink (1998), *framing* berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses advokasi untuk mendefinisikan masalah, mengidentifikasi korban maupun pelaku, dan menawarkan solusi yang relevan. Strategi ini mencakup proses identifikasi isu, pemilihan *frame* yang tepat, dan penyusunan pesan yang singkat, padat, dan persuasif, yang didukung oleh data dan simbol yang relevan.

Selanjutnya, penyebaran pesan dilakukan melalui distribusi media, termasuk pemanfaatan media internasional dan penggunaan *hashtag* di media sosial. Intinya, strategi ini menekankan pentingnya narasi yang efektif, melalui pemilihan bahasa, simbol, dan bentuk komunikasi yang sesuai, untuk memaksimalkan peluang mendapatkan dukungan dari aktor-aktor internasional (Keck & Sikkink, 2014).

1.5. SINTESA PEMIKIRAN



Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis

Sintesa pemikiran penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dari Margaret Keck dan Kathryn Sikkink untuk menjelaskan strategi

gerakan pemuda pro-demokrasi Myanmar dalam melawan represi junta militer pascakudeta 2021. Ketika saluran advokasi domestik mengalami *non-functioning channels* akibat kekerasan dan pembatasan politik, aktor domestik kemudian membangun hubungan dengan aktor internasional melalui mekanisme *boomerang pattern*. Mekanisme ini memungkinkan isu Myanmar diangkat ke tingkat global melalui keterlibatan diaspora, NGO internasional, media global, dan organisasi internasional guna menciptakan tekanan terhadap junta militer. Implementasi strategi tersebut berlangsung dalam dua ranah, yaitu *online* dan *offline*. Pada ranah *online*, advokasi dilakukan melalui media sosial, kampanye tagar, dan penyebaran informasi digital, sedangkan pada ranah *offline* dilakukan melalui demonstrasi diaspora, aksi solidaritas, dan lobi internasional. Dalam kedua ranah tersebut, gerakan pemuda Myanmar memanfaatkan *information politics* untuk menyebarkan informasi pelanggaran HAM serta *symbolic politics* melalui simbol, visual, dan narasi moral guna membangun solidaritas internasional. Selanjutnya, strategi tersebut diperkuat melalui *framing strategies* yang mencakup *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing* untuk membentuk persepsi global terhadap isu Myanmar.

1.6. ARGUMEN UTAMA

Gerakan pemuda pro-demokrasi Myanmar memanfaatkan *Transnational Advocacy Networks* (TANs) sebagai strategi utama untuk melawan represi junta militer pada periode 2021-2024 di tengah tertutupnya saluran advokasi domestik. Melalui mekanisme *boomerang pattern*, aktor domestik membangun jaringan dengan diaspora,

NGO internasional, media global, dan organisasi internasional untuk menciptakan tekanan internasional terhadap junta militer Myanmar. Dalam proses tersebut, gerakan pemuda memanfaatkan *information politics* melalui penyebaran dokumentasi pelanggaran HAM dan *symbolic politics* melalui penggunaan simbol, narasi moral, visual kampanye, dan *hashtag* seperti *#WhatsHappeningInMyanmar* dan *#MilkTeaAlliance* untuk membangun solidaritas global. Strategi advokasi ini dilakukan melalui ranah *online* dan *offline* guna memperluas perhatian internasional serta membingkai isu Myanmar sebagai perjuangan demokrasi dan HAM yang selaras dengan nilai universal komunitas global.

1.7.METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian didefinisikan sebagai proses pencarian yang metodis dan terstruktur untuk mengurai serta menemukan jawaban atas suatu fenomena atau masalah (Susanti, 2016). Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menyajikan gambaran yang mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar dalam membentuk aliansi internasional untuk melawan represi junta militer pada periode 2021-2024. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menguraikan fenomena secara terperinci berdasarkan data yang dikumpulkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi mobilitas transnasional yang diterapkan oleh gerakan tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar yang secara langsung berhadapan dengan represi yang dilancarkan oleh junta militer. Penelitian ini mencakup periode krusial dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu sejak dimulainya kudeta militer dan respons dari Gerakan perlawanan sipil (Civil Disobedience Movement/CDM) yang kemudian mendorong aktivasi advokasi transnasional. Kajian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer, mengidentifikasi dampak politik dan sosial dari krisis tersebut, serta menjelaskan secara mendalam mengenai strategi advokasi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang diimplementasikan oleh pemuda Myanmar.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian mengenai gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar, pengumpulan data dilakukan sebagai proses pencarian data primer maupun sekunder yang relevan (Susanti, 2016). Mengingat sifat kasus dan jangkauan penelitian yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang telah terjadi, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis konten digital terhadap sumber yang berkaitan dengan gerakan pemuda pro-demokrasi Myanmar periode 2021-2024. Data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, laporan NGO internasional, organisasi HAM, media global, serta dokumen resmi yang relevan dengan strategi TANs. Untuk mengurangi bias perspektif Barat, penelitian ini juga menggunakan media lokal dan regional Myanmar seperti *The Irrawaddy*, *Myanmar*

Now, Democratic Voice of Burma (DVB), Frontier Myanmar, dan Mizzima News sebagai bentuk triangulasi data.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis konten digital pada media sosial seperti *Twitter/X, Instagram, dan TikTok* untuk melihat implementasi strategi advokasi digital gerakan pemuda Myanmar. Fokus analisis meliputi penggunaan *hashtag*, narasi solidaritas, poster digital, dan visual kampanye yang digunakan dalam membangun perhatian internasional terhadap isu Myanmar. Pemilihan *hashtag* dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada tingkat popularitas semata, tetapi juga mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu konsistensi penggunaan selama periode 2021-2024, keterkaitan langsung dengan gerakan pro-demokrasi Myanmar, penggunaan oleh aktor domestik maupun diaspora, kemunculan dalam pemberitaan media internasional, serta kemampuannya dalam membangun solidaritas internasional. Penentuan indikator tersebut merujuk pada penelitian *Digital Forensic Research Lab* yang menjelaskan bahwa aktivis pro-demokrasi Myanmar menggunakan *hashtag* secara terkoordinasi untuk memperluas jangkauan advokasi, mendokumentasikan pelanggaran junta militer, dan menjaga keberlangsungan gerakan di ruang digital internasional (Yadav, 2021).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian mengenai gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar, penting untuk menggunakan metode analisis data yang tepat. Oleh karena itu, penulis memilih analisis data kualitatif. Menurut Bungin (2014), analisis kualitatif memungkinkan penulis untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai data

yang ditemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu fenomena. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dinilai selaras dengan strategi penelitian yang digunakan sebelumnya. Penelitian terhadap kasus gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar akan mengungkap penjelasan yang bersumber dari berbagai media, pernyataan resmi junta militer, serta fakta dan informasi dari aktor-aktor kunci yang terlibat. Hasil akhir dari penelitian ini adalah penjelasan berbasis kualitatif (narasi/deskriptif) mengenai variabel atau peristiwa yang diteliti, dan bukan berupa perhitungan angka-angka (kuantitatif)

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan dibagi menjadi empat bab utama, yakni meliputi:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini berfungsi sebagai pengantar penelitian. Di dalamnya, penulis menyajikan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, menetapkan kerangka pemikiran dan sintesa, menyajikan argumen utama, serta memaparkan tinjauan pustaka dan metode-metode yang digunakan dalam menganalisis studi kasus gerakan sosial pemuda pro-demokrasi Myanmar.

BAB II: Bab ini didedikasikan untuk membahas secara mendalam bagaimana jaringan advokasi transnasional yang dibangun oleh pemuda dan diaspora Myanmar beroperasi dalam merespons represi politik pascakudeta. Bab ini menitikberatkan pada pemetaan mekanisme *boomerang pattern* dalam ranah *online* dan *offline*, serta peran *information politics* dan *symbolic politics* dalam membangun tekanan internasional terhadap junta militer.

BAB III: Bab ini memfokuskan pembahasan pada penggunaan *framing strategies* dalam membentuk persepsi publik internasional terhadap krisis Myanmar. Analisis dilakukan melalui tiga bentuk *framing*, yaitu *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing*.

BAB IV: Bab terakhir ini berisi bagian penutup dari keseluruhan penelitian. Isi bab ini mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dibahas, serta memuat kritik dan saran dari penulis untuk pembaca.